ABSTRAK

Pande Ketut Natalia Desintha (01656230049)

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN MELALUI PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN GIANYAR.

(xiii + 114 halaman; 1 gambar; 10 tabel; 16 lampiran)

Sektor pariwisata adalah penyumbang dividen tertinggi di Indonesia, termasuk juga Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar. Pelaksanaan kepariwisataan di Kabupaten Gianyar dilakukan berdasarkan Standar Kepariwisataan Kebudayaan Bali yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Saat ini terdapat 8 (delapan) Daya Tarik Wisata (DTW) yang dikelola bersama-sama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan Desa Adat setempat berdasarkan perjanjian kerja sama bagi hasil karcis masuk DTW. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar berperan untuk menjamin bahwa pengelolaan DTW tersebut sesuai dengan standar kepariwisataan, sedangkan Desa Adat berperan sebagai pemilik atas DTW tersebut. Guna melihat kesesuaian pelaksanaan perjanjian pengelolaan DTW di Kabupaten Gianyar, diperlukan penelitian mengenai prosedur dan substansi perjanjian kerja sama serta analisis normatif atas pelaksanaan perjanjian pengelolaan DTW. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan asas-asas dan sinkronisasi hukum dan ditambah dengan wawancara *bendesa pengempon* DTW, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dan Guru Besar Hukum Adat Bali. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan DTW ini belum mencerminkan keadilan khususnya bagi Desa Adat. Maka dari itu, diperlukan seseorang yang berwenang untuk membuat perjanjian dan dapat menjadi penyuluh hukum. Keterlibatan seorang notaris yang independen, mandiri dan tidak berpihak dapat menjadi jawaban dalam proses pembuatan perjanjian kerja sama pengelolaan DTW di Kabupaten Gianyar.

Referensi : 59 (1945 – 2025)

Kata Kunci : Keadilan, Peran Notaris, Daya Tarik Wisata

ABSTRAK

Pande Ketut Natalia Desintha (01656230049)

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN MELALUI PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN GIANYAR.

(xiii + 114 pages; 1 image; 10 tables; 16 attachments)

The tourism sector is the highest contributor of dividends in Indonesia, including in Bali Province and Gianyar Regency. Tourism activities in Gianyar Regency are carried out based on the Balinese Cultural Tourism Standards established by the local government. Currently, there are 8 (eight) Daya Tarik Wisata (DTW) jointly managed by the Gianyar Regency Government and Desa Adat through a revenue-sharing agreement on entrance ticket sales. The local government is responsible for ensuring that DTW management complies with tourism standards, while the Desa Adat retains ownership of the attractions. To assess the alignment of these management agreements with applicable standards, research is required on both the procedures and the substance of the cooperation agreements, along with a normative analysis of their implementation. Data collection for this research was conducted through a legal principles and synchronization approach, complemented by interviews with Bendesa, the Gianyar Tourism Office, and a Professor of Balinese Customary Law. Findings indicate that the current agreements do not yet reflect fairness, particularly for the Desa Adat. Therefore, an authorized legal facilitator is needed. The involvement of a notary who is independent, impartial, and professional is seen as a crucial solution in drafting equitable DTW management agreements in Gianyar Regency.

Reference : 59 (1945 – 2025)

Keywords : Justice, Notary, Tourism Attraction